

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara – negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara – negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus (Suharto, 2009:131). Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah – tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan negara – negara maju.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapat pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 225 juta jiwa, serta dengan aneka ragam budaya dan kelas sosial (BPS:2015), membuat Indonesia rentan terhadap masalah ekonomi berdampak langsung pada kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan mencapai 28,59 juta jiwa yang berarti sekitar 11,22 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan pada Maret 2015 (BPS:2015).

Salah satu amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Sosial menggunakan berbagai program dan stimulasi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khususnya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial

Republik Indonesia yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia disekitar mereka.

Program Keluarga Harapan (PKH), program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan, yang bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. PKH diberikan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), dimana seluruh RTSM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu

memenuhi kewajibannya. Data RTSM diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepersertaan PKH, yaitu :

1. Ibu hamil dan anak balita
2. Anak pra sekolah atau masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)
3. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak sekolah SLTP/MTs?Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Program Keluarga Harapan (PKH) digulirkan di Kabupaten Majalengka untuk merespon permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Cigasong. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Majalengka khususnya yang terdapat di Kecamatan Majalengka untuk ikut berperan serta terdapat program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk perawatan dan pendampingan terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “ Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat “. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari kabupaten/kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Jadi berdasarkan uraian – uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggaraan pemerintahan umum.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan PKH, sehingga perlu dilakukan penelitian penetapan sasaran bantuan PKH yang berarti apakah bantuan yang diterima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) digunakan untuk menunjang tujuan PKH.

Maka dari uraian tersebut terlihat bahwa pendistribusian dana anggaran untuk masyarakat dalam program keluarga harapan yang baik seharusnya memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, salah satu bantuan PKH yang perlu dikembangkan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sehingga dari hasil pengamatan penulis, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong masih perlu dikembangkan dalam segi pendistribusian dana anggaran untuk masyarakat, masalah tersebut diatas dikarenakan bantuan yang dilaksanakan oleh PKH Kecamatan Cigasong belum berkualitas, seperti :

1. Kurangnya data yang sesuai pada data PKH
2. Kurang tepatnya sasaran dalam bantuan PKH

Berdasarkan pengamatan dari penulis nampak bahwa belum optimalnya pendistribusian dana anggaran untuk masyarakat dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dari penulis nampak bahwa belum optimalnya pendistribusian dana anggaran untuk masyarakat dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau belum mencapai hasil yang ideal dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

1.3 Identifikasi Masalah

Latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ?
2. Faktor - faktor apa saja yang penghambat dan pendukung dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya.
- b. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat bahwasannya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Istilah “Implementasi” sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan.

Menurut George C. Edward III dalam Sahaya Anggara (2014:249) menyatakan bahwa:

“ Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan.”

Sedangkan menurut George C. Edward III dalam Budi Winarno (2012:177) mengemukakan bahwa:

“ Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat dari pengaruhnya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.”

George C. Edward III dalam Leo Agustino (2014:149) mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resources* (Sumber-sumber)
3. *Disposition* (disposisi)
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)

Keempat faktor tersebut dijadikan teori dalam penyusunan skripsi ini sehingga pada uraian selanjutnya secara lebih rinci.

1. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi yaitu:

- a. Tranmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

2. *Resources* (Sumber daya)

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Indikator sumber-sumber daya beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

3. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak

hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Hal-hal penting perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

- a. Pengangkatan birokrat
- b. Insentif

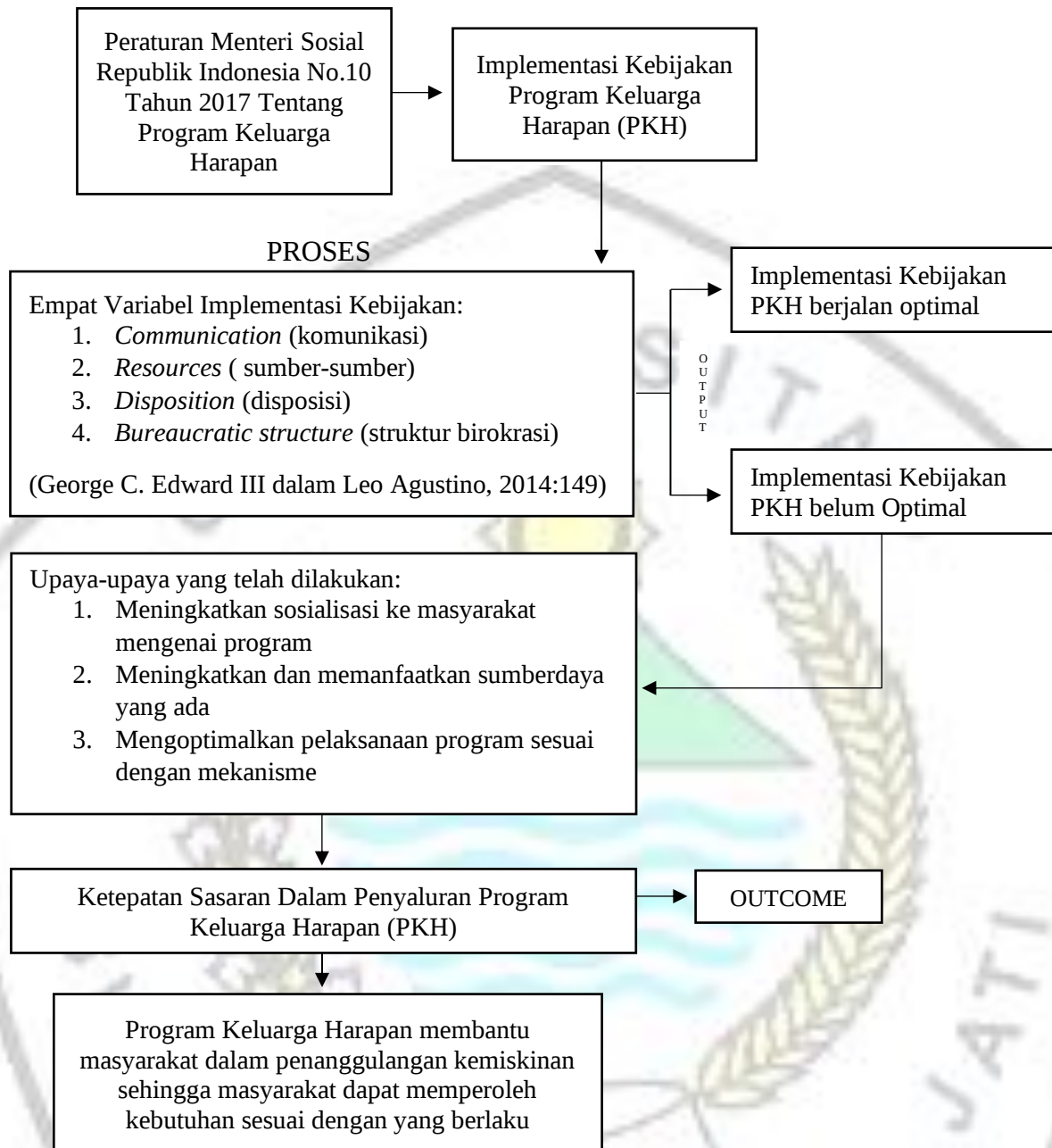
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi.

Oleh karena itu, keempat factor tersebut harus mendapat perhatian yang serius dan harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan.





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

- a. Implementasi adalah sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan. (Edward III dalam Sahaya Anggara, 2014:249).
- b. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Carl Friedrich dalam Leo Agustino, 2014:7).
- c. Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. (Edward III dalam Budi Winarno, 2012:77).
- d. Program adalah kata, ekspresi atau pertanyaan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian dijabarkan menjadi parameter – parameter. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka konsep penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu : (Implementasi Kebijakan) dioperasionalkan atau dijabarkan kedalam parameter seperti data terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep Penelitian	Dimensi	Paremeter
Implementasi Kebijakan (Edward III dalam Leo Agustino, 2014:149)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber – Sumber	1. Informasi 2. Staf 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Pengangkatan Birokrat 2. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	1. Standar Operating Prosedures (SOP) 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau usaha keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi. Deskripsi peristiwa atau keadaan tersebut menurut Bogdan dan Biklen (*Bogdan, Robert C. and Biklen, Sari Knop, 1998:4-7*).

Pendekatan kualitatif, digunakan juga untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi dibelakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. (*A. Strauss dan J. Corbin, 1990:19*). Pada penelitian kualitatif, peneliti mempunyai banyak keleluasaan dalam menyusun proses penelitian dan menganalisa catatan lapangan. (Lexy J. Moleong: 2004:158).

Penelitian kualitatif juga memungkinkan adanya kedekatan emosional karena kepribadian peneliti tidak dibuat netral, seperti cara berpikir positif untuk mencapai kebenaran obyektif, tetapi sebaliknya, kepribadian peneliti (factor subyektif) diangkat kepermukaan sebagai cara untuk menarik informasi. Hal tersebut mengacu atas sifat kealamiah seting dan sumber data sesuai dengan karakteristik paradigma kualitatif itu sendiri, yaitu: (1) dilakukan pada latar (Lexy J. Moleong: 2004:158) alamiah, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih mementingkan proses daripada hasil, (4) menggunakan analisis induktif dan (5) pengungkapan makna adalah tujuan esensinya.

Maka konsentrasi penelitian ini adalah:

- a. Pengungkapan data kondisi objektif tentang penyaluran bantuan social melalui data yang benar-benar ada dan terjadi di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.
- b. Deskriptif merupakan suatu cara yang dianggap paling tepat untuk menguraikan berbagai fenomena yang sedang terjadi dilapangan penelitian yaitu Kecamatan Cigasong lebih menekankan pada sisi pengamatan daripada hasil.
- c. Penggunaan analisis data bersifat kerucut terbalik artinya menguraikan permasalahan yang bersifat umum terlebih dahulu, guna menghasilkan sesuatu yang bersifat khusus yakni tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, penelitian tidak menentukan populasi tetapi menentukan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi, keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan inilah yang menjadi sumberdata utama dalam penelitian kualitatif.

Informan terdiri dari dua macam yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti tersebut, sedangkan informan pendukung adalah orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informan pelengkap atau tambahan.

Berdasarkan uraian diatas, teknik pemilihan informasi dalam penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka yakni:

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- b. Pendamping PKH dan masyarakat.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ini untuk menghimpun data dan informasi adalah suatu kepustakaan dan studi lapangan prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber data dan lokasi dimana informan melaksanakan tugasnya. Adapun uraian singkat teknik – teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data – data dari sumber – sumber tertulis antara lain dengan mempelajari dan membaca buku – buku, dokumen – dokumen, internet serta sumber – sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan terbagi menjadi dua yaitu Observasi dan Wawancara. Penjelasan mengenai observasi dan wawancara adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengenalan secara langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua yaitu :

a. Observasi Partisipatif

Peneliti tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga terlihat dalam aktifitas dilokasi penelitian. Jadi disini peneliti seolah – olah

bertindak seperti “orang dalam” yang mengamati. Contohnya penelitian yang dilakukan dengan cara magang kerja seperti kegiatan Ristik.

b. Observasi NonPartisipatif

Peneliti hanya melakukan pengamatan tetapi tidak terlibat oleh aktifitas di lokasi tersebut. Jadi peneliti hanya bertindak sebagai orang luar yang mengamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pimpinan atau pejabat lainnya yang berada di lokasi penelitian.

a. Wawasan Terpimpin

Wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan berpedoman pada pedoman wawancara, maka jalannya wawancara akan terfokus dan tidak akan keluar dari kompleks masalah yang diteliti.

b. Wawancara Tidak Terpimpin

Wawancara yang dilakukan dengan tidak berpedoman pada pedoman wawancara. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara bebas, maka jalannya wawancara akan tidak terfokus dan dapat keluar dari konteks masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang

dibuat oleh subjek sendiri ataupun oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, peraturan, biografi, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, dan lain – lain.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Menurut Patton dalam buku Lexy Meleong (2004:336), mengatakan bahwa Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Teknik Triangulasi data menurut Denzin dalam Lexy Meleong (2004:330), yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber dan metode, peneliti penyidik teori.

a. Triangulasi Sumber (Data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Penyidik

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya

untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

d. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Untuk dapat mencapai keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi metode yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Data yang diperoleh melalui sumber, kemudian dilakukan diuji keabsahan melalui triangulasi metode.

Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan yang lain. Membandingkan hasil wawancara tersebut dengan sumber data hasil pengamatan penelitian. Akhirnya keseluruhan hasil data tersebut dibandingkan pula dengan analisis dokumen. Dengan demikian diharapkan mutu dari keseluruhan proses pengeumpulan data penelitian ini menjadi valid atau absah.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Analisi data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy Moleong (2014:248) :

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencarinya dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain “

Adapun tahap – tahap analisis data adalah :

a. Pengumpulan Data

Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung maupun dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Reduksi Data

Merupakan kegiatan untuk memilah – milah data yang telah diperoleh lapangan, dalam hal ini ditekankan pada hal – hal yang pokok dan penting yang disusun secara sistematis. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, hal ini mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan.

c. Penyajian Data

Adalah suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh lapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data ini akan membantu dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sebenarnya. Kegiatan data disamping sebagai kegiatan analisis juga merupakan kegiatan reduksi data.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah salah satu usaha untuk menyimpulkan berbagai informasi yang telah diperoleh lapangan. Kesimpulan yang diperoleh belum tentu sempurna kemungkinan masih ada beberapa data yang perlu diverifikasi, kegiatan

verifikasi adalah mencari data baru untuk menguatkan kesimpulan yang telah diambil sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi (Obyek) penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Cigasong Jalan Cigasong-Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Dengan mempertimbangkan alasan sebagai berikut :

- a. Masih terdapat masalah tentang penyaluran Program Keluarga Harapan
- b. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian selama 7 bulan mulai dari Bulan Februari 2020 sampai Oktober 2020. Berdasarkan jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut

